

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis pajak yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk membiayai anggaran rumah tangga negara. Pajak Daerah ialah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II untuk membiayai anggaran rumah tangga daerah. Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Early Suandy, 2002 : 41).

Hingga saat ini pemerintah sedang menciptakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan ini meliputi berbagai aspek dilaksanakan baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Pembangunan di tingkat daerah dilakukan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu program yang memberikan wewenang, tanggung jawab, kebijakan pada suatu daerah untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri dan memajukan tingkat perekonomian yang lebih baik bagi daerah itu sendiri. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah memegang peranan penting dalam membiayai pembangunan. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah maka sistem perpajakan terus ditingkatkan, disederhanakan dan disempurnakan. Adapun pajak daerah yang dipungut oleh DPPKAD Kota Semarang adalah Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah secara professional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proposi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada.

Berkaitan dengan hal tersebut yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui bagaimana peran realisasi dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG”.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam Tugas Akhir ini, akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penulisan serta uraian pembahasan, sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah dipilih.

Berdasarkan judul yang telah dipilih, maka ruang lingkup pembahasan masalah secara garis besar dapat dirumuskan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Gambaran umum mengenai pajak restoran:
 - a. Gambaran umum pengertian pajak, fungsi, manfaat dan asas pemungutan.
 - b. Pengertian pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Pengertian Restoran dan Pajak restoran dan landasan hukum pajak restoran.
 - d. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran.
 - e. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakupi sumber pendapatan daerah dan pengertian pajak.
 - f. Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Pajak Restoran.
2. Seberapa jauhkah Realisasi Penerimaan dan kontribusi Pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dan Pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kota Semarang.
3. Hambatan dan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran kantor DPPKAD Kota Semarang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai setelah melakukan serangkaian kegiatan. Sedangkan tujuan dari disusunnya Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk membandingkan dan menerapkan teori yang diterima dibangku kuliah dengan praktek yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang pajak restoran di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (DPPKAD), dan untuk mengetahui seberapa besarkah presentase pertumbuhan realisasi dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ketahun pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang di hadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota Semarang (DPPKAD) dalam realisasi pajak restoran.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Disamping mempunyai tujuan, laporan penyusunan tugas akhir ini memiliki kegunaan :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana realisasi penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang ada dalam instansi Pemerintah dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di Universitas Diponegoro Semarang dengan kondisi yang ada dalam dunia kerja.
2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mengenai masalah-masalah yang terkait dengan bagaimanakah realisasi penerimaan pajak restoran.

3. Dapat menjadikan sarana untuk menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.4 Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data

1.4.1 Jenis Data

Menurut sumbernya data terbagi dua, yaitu :

1. Data Primer

“Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000:55)”. Data Primer yang diperoleh dari kerja praktek ini dilakukan memulai kegiatan observasi pada bidang pajak daerah seksi penagihan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

2. Data Sekunder

“Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, dan keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 2000:55)”. Data sekunder yang diperoleh adalah gambaran umum, data-data yang berhubungan dengan prosedur penagihan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.4.2 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data diperlukan agar dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang obyek atau permasalahan yang disampaikan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi :

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti (Keraf, 1994:162). Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis melakukan pengamatan secara langsung kegiatan pekerja bidang pajak daerah seksipenerimaan pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung ke informasi atau seseorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah) (Keraf, 1994:161). Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait mengenai penagihan pajak reklame dengan cara melakukan tanya jawab atau dialog langsung agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil literatur yang ada kaitannya dengan judul, kesimpulan para ahli dimana sebagai penuntun untuk menuju pada suatu sasaran yang sedang diteliti (Keraf, 1994:152). Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, referensi yang ada dipergustakaan yang berhubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang hendak dibicarakan sehingga tercipta suatu pemikiran dan gambaran objek yang jelas maka diperlukan suatu sistematika penyusunan laporan. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menguraikan latar belakang Realisasi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kota Semarang, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan Tugas Akhir,
- BAB II : Gambaran umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menguraikan tentang sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta lokasi wilayah kerja,
- BAB III : Tinjauan teori dan praktek, menguraikan tentang gambaran umum pajak restoran meliputi: pengertian restoran, pengertian pajak restoran, objek pajak restoran dan pengertiannya, subjek pajak restoran, selanjutnya realisasi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak restoran serta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh kantor DPPKAD,
- BAB IV : Merupakan rangkuman yang telah ditulis dalam hasil pembahasan tinjauan teori dan praktek tentang realisasi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kota Semarang.